

## PENGARUH PENGATURAN TERHADAP PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MALANG

Lit Abdul Karim, Dody Setyawan, Sugeng Rusmiwari

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email: lit.abdulka@yahoo.com

**Abstrak:** Desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat ke lembaga-lembaganya. Implementasi desentralisasi adalah dengan dikeluarkannya peraturan daerah (perda) tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Malang tahun 2000. Akan tetapi, pelaksanaan terhadap peraturan daerah (perda) tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan sumber data primer yang diperkuat data sekunder dengan alat pengambilan data angket, dokumen dan observasi, teknik sampling dengan menggunakan *purposive sampling*, analisa data dilakukan dengan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi serta skala likert. Hasil penelitian Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang berjalan dengan baik 35%, dan Pembinaan berjalan dengan baik 35%. Bahwa pengaturan pedagang kaki lima yang baik membawa pada pembinaan pedagang kaki lima yang baik.

**Kata Kunci:** Pengaturan, Pembinaan, Pedagang Kaki Lima

**Abstract:** *Decentralization as devolution of authority and responsibility or authority to conduct some or all of the functions and administration of the central government to the institutions. Implementation of decentralization is the issuance of local regulations (regulations ) on setting and coaching hawkers in the city of Malang in 2000. However, the implementation of the local regulations (regulations ) have not been completely worked well. Methods of research conducted by quantitative descriptive type of research, the primary data source is amplified by means of secondary data pengambilan questionnaire data, documents and observation, sampling techniques using purposive sampling, data analysis conducted with the data reduction, data presentation, and conclusion/verification and Likert scale. The results of the research setting Street Vendors in Malang runs fine 35%, and fostering runs fine 35% . That setting a good street vendor carries on building a good street vendors.*

**Keywords:** *Settings , Development, Vendors Coaching*

### PENDAHULUAN

Desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat ke lembaga- lembaganya, pejabat pemerintah atau perusahaan yang bersifat semi otonom, kewenangan fungsional lingkup regional atau daerah, lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Smith, (1985) dalam Domai, (2011:55).

Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka wajib bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang nantinya untuk membawa dampak baik bagi kehidupan warganya serta daerahnya. Suharto, (2011:3), menyebutkan tentang kebijakan yakni kebijakan pada intinya merupakan keputusan- keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga Negara.

Kejadian-kejadian nyata yang tampak pada lingkungan masyarakat yang menjadi perbincangan atau menjadi masalah serta menjadi pekerjaan satuan pamong praja yakni salah

satunya keberadaan pedagang kaki lima, dimana pedagang kaki lima ini melakukan kegiatan usahanya di tempat-tempat umum yang nantinya bias menimbulkan keresahan dan masalah seperti menggunakan jalan trotoar, padahal trotoar sering dilalui oleh pejalan kaki tapi karena adanya kegiatan pedagang kaki lima maka antara pengendara mobil/motor dengan pejalan kaki harus rela berbagi jalan. Dengan kejadian seperti itu Pemerintah Kota Malang mengeluarkan peraturan daerah tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang tahun 2000. Dalam Peraturan daerah tersebut pedagang kaki lima dimaknai yaitu pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan. Maka dari latar belakang masalah inilah peneliti akan mengambil judul penelitian yaitu Pengaruh Pengaturan Terhadap Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data, Sugiyono, (2012:11).

Lokasi penelitian yaitu di Kota Malang: Kantor Dinas Pasar dan Pedagang kaki lima Kota Malang. Teknik pengumpulan data kuesioner menghasilkan data primer, observasi dan dokumentasi menghasilkan data sekunder. Teknik sampling menggunakan purposive sampling, Sugiyono, (2012:126). Teknik analisis data dilakukan dengan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi serta skala likert.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 1. Variabel Dan Hasil Penelitian 2014

<b>Variabel X</b>	<b>Variabel Y</b>	<b>Klasifikasi</b>
A. 10%	A. 10%	Sangat Baik
B. 35%	B. 35%	Baik
C. 35%	C. 25%	Cukup
D. 15%	D. 15%	Kurang Baik
E. 5%	E. 15%	Sangat Kurang Baik

Sumber :Data primer diolah dari hasil keseluruhan kuesioner.

#### **Analisis deskripsi variabel pengaturan pedagang kaki lima**

Ditemukan untuk variabel pengaturan pedagang kaki lima ditemukan sebesar 35% responden mengatakan baik. Menunjukkan bahwa pengaturan pedagang kaki lima baik.

Maknanya bahwa dalam mengatur pedagang kaki lima di Kota Malang oleh Pemerintah Kota Malang sudah baik. Namun, perlu adanya pembenahan pengaturan terhadap keberadaan pedagang kaki lima supaya kawasan Kota Malang menjadi tertib dan indah. Dan menjadikan keberadaan pedagang kaki lima sebagai daya tarik wisata serta mampu memberikan pendapatan daerah Kota Malang.

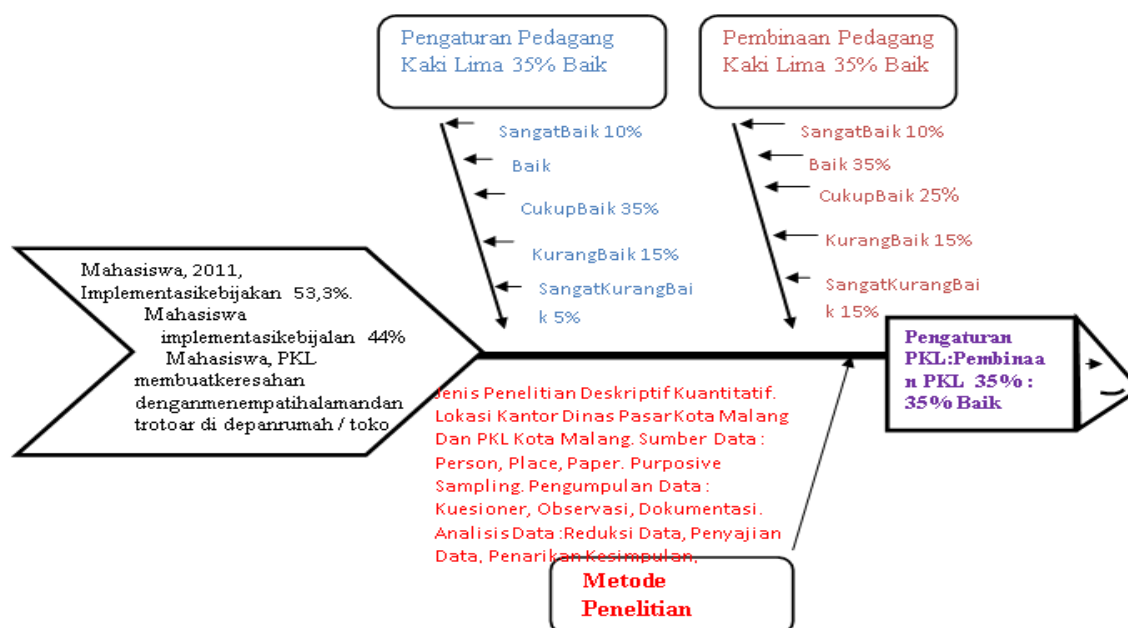
### Analisis deskripsi variabel pembinaan pedagang kaki lima.

Ditemukan untuk variabel pembinaan pedagang kaki lima sebesar 35% responden mengatakan baik. Menunjukkan bahwa pembinaan pedagang kaki lima baik. Maknanya bahwa dalam membina pedagang kaki lima di Kota Malang oleh Pemerintah Kota Malang sudah baik. Namun adanya ketetapan atau konsistensi pemerintah dalam memberikan pembinaan secara terus berlanjut kepada pedagang kaki lima.

### Interpretasi Data

Bahwa pengaturan pedagang kaki lima yang baik membawa pada pembinaan pedagang kaki lima yang baik.

Gambar 2. Hasil Penelitian Dalam Diagram Fishbone



Sumber : Data primer diolah dari keseluruhan kuesioner

### KESIMPULAN

Bahwa pengaturan pedagang kaki lima yang baik membawa pada pembinaan pedagang kaki lima yang baik. Dapat dilihat dari hasil rekapitulasi kedua variable yaitu pengaturan pedagang kaki lima 35% : pembinaan pedagang kaki lima 35%.

### DAFTAR PUSTAKA

Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).  
Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.  
Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Daerah Kota Malang, *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Malang.*